

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Kencana. Jakarta. hlm. 677.
- 2014, BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 44
- Desember 2017, Ade Irawan Taufik, Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM, Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, EODB, <http://eodb.ekon.go.id/pentingnyasurvei-ini/>
- 2017, Disampaikan oleh Enny Nurbaningsih, selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional 2017 “Kebijakan Penataan Regulasi untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berjiwa Pancasila” yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan UKP Pancasila di Jakarta, tanggal 25 Oktober.
- H.R, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksabang Presindo, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta.
- Christine, Kansil dkk, 2009, Kamus Istilah Aneka Hukum. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Septiwinarsih, Atik dan Ratminto, 2006, Manajemen Pelayanan Publik. Pustaka, Yogyakarta.
- Brotosusilo, Agus dkk, 1994, Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen. Konsorsium Ilmuan Hukum Departemen PDK, Jakarta.
- Mamudji, Sri dkk, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.



Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010, Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

J. Supranto, 2006, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2000, Pengantar Teori Makro ekonomi. Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2000, Vol. 15, No. 3, 280 – 293.

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, disunting oleh Philipus M. Hadjon, SH, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yurudika, Surabaya, hlm. 2-3

Van der Pot dalam Utrecht dan Moh Saleh Djindang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta. hlm 143

S. Prajudi Atmosudirdjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, loc.cit. hlm. 94

Amrah Muslimin, SH, 1982, Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni Bandung, hlm. 118

S. Parjaudi Atmosudrdjo, 1983, *locit*, hlm 94

Ateng Syafruding :Izin untuk Berbagai Kegiatan”, makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1

H.D van Wijken Willem Konjinenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga's - Gravenhage, 1995 hlm. 224

W.F Prins dan Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm, 42

Utrecht, 198, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 94

C.J.N Verstedden, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samson HDTjeenk Wilink, Alphen aan den Rij, 1984, hlm. 69

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTNFH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153

Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 20



Prajudi Atmo Sudirdjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23

J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 228.

Ratminto dan Atik Septiwinarsih, Manajemen Pelayanan Publik, Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

Joko Widodo, *Good Governance*; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18

Paulus Effendi Lotulung, Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan *Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, hlm. 37

Abdullah, Kasman, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep *Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 65

Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004, hlm. 3.

Adriwati, 2001, Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 300

William Akotam Agangiba and Millicent Akotam Agangiba *E-governance justified* (*University of Mines and Technology Tarkwa, Ghana*, 2013) hlm. 1

Tristan Meijerink, *Assessing the e-governance maturity level of Dutch municipalities through the analysis of municipal websites*. (Universiteit Twente, 2016) hlm. 16

Dobrica Savic. *E-Governance Theoretical foundations and practical implications* (Montreal, 2006) hlm. 32



Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya, Peranan *E-Government* dalam mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (studi kasus website resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung) (Universitas Udayana, 2014) hlm. 5

Rizal Andreeyan, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Unmul, 2014) hlm. 40

Santy Nurina Aprilia, Andy Fefta Wijaya, Suryadi, Efektifitas Website sebagai Media E- Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang) (Universitas Brawijaya, 2014) hlm. 130

Julio Adisantoso, Metode Pengamanan Jaringan pada Model Kerja e-Government (IPB, 2011) hlm. 6

Agus Brotosusilo, et al, Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994), hlm. 8

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1336).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1337).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1338).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IV/MPR/1978.

### C. Internet

<http://www.dephub.go.id/post/read/dukung-online-single-submission,-kemenhub-lakukan-reformasi-regulasi-197-perizinan-di-bidang-transportasi?language=id>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, EODB,  
<http://eodb.ekon.go.id/pentingnyasurvei-ini/>

<https://www.kompasiana.com/yovita97855/5c0886bb6ddcae70992db6a6/pertumbuhan-ekonomi-berdasarkan-pengembangan-sektor-unggulan-di-kabupaten-sidoarjo?page=all>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/24/13-paket-ekonomi-dan-pangkas-ribuan-perda-dilakukan-selama-2-tahun-jokowi-jk>

<https://www.kompasiana.com/yovita97855/5c0886bb6ddcae70992db6a6/pertumbuhan-ekonomi-berdasarkan-pengembangan-sektor-unggulan-di-kabupaten-sidoarjo?page=all>. diakses pada 10 Oktober 2019.

Suhartoto, Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, March 2019

UNDP, 1997, Governance for Sustainable Human Development, United Nations Development Programme

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.

<http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-terus-lakukan-deregulasi-perizinan-di-bidang-transportasi>

Philipus M. Hadjon ed Pengantar Hukum Perizinan (Yuridika 1993)



**PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG TRANSPORTASI DI INDONESIA**

FARID ALFANSYA S, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/9/868904/opini-upaya-memperbaiki-izin-usaha-dengan-oss>

H.A. Masyur Efendi, HakAsasiManusiaDalamHukumNasional dan Internasional  
(GhaliaIndonesia, 1993)